

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi Indonesia tidak terlepas dari kemajuan dunia industri dan perdagangan. Perkembangan ekonomi ini harus diimbangi dengan perangkat hukum yang perlu dikembangkan dan ditegakkan guna mengimbangi kebutuhan kemajuan masyarakat. Oleh karena itu, dalam era globalisasi perdagangan, pembangunan hukum di Indonesia diharapkan mampu mengantisipasi kemajuan di setiap sektor kehidupan masyarakat.

Era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi telah mendorong pemasaran produk ke luar negeri. Sebagian besar barang dan jasa hasil karya intelektual yang diperdagangkan merupakan produk-produk teknologi tradisional ataupun modern dari Indonesia. Kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat Indonesia dapat berupa karya-karya seni, karya sastra, filsafat, catatan perkembangan seni, sejarah, bahasa, ilmu hukum, wayang, batik, naskah klasik, naskah primbon, obat-obatan, dan lain-lain. Kekayaan intelektual tersebut harus mendapat perlindungan agar tidak dijiplak, tidak diakui sebagai milik negara lain, dan tidak dikomersialisasi oleh negara lain.

Dalam konteks ini munculah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang merupakan sistem pengakuan dan perlindungan terhadap karya, cipta dan penemuan yang timbul atau dilahirkan oleh manusia yang di dalamnya terdapat item-item yang terdiri dari hak cipta, merek dagang, indikasi geografis, desain industri, paten, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, merek dan

perlindungan varietas tanaman. Hal ini menjadi *trend* yang kemudian dipakai oleh masyarakat untuk lebih melindungi dan mengikat hak atas karya intelektualnya.¹

Dalam tatanan ekonomi global HKI dipandang sebagai masalah perdagangan yang mencakup interaksi dari tiga buah aspek utama, yaitu kekayaan intelektual, komersialisasi dan perlindungan hukum. Konsep HKI menjadi penting ketika sebuah karya intelektual hendak dikomersialkan sehingga pemilik karya intelektual tersebut membutuhkan perlindungan hukum formal untuk melindungi kepentingan mereka dalam memperoleh manfaat dari komersialisasi karyanya.

Perlindungan yang diberikan pemerintah untuk melindungi masyarakat dari barang-barang tiruan/bajakan, maka pada tanggal 12 April 1982 Pemerintah mengesahkan UU No.6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta 1982) untuk menggantikan UU Hak Cipta peninggalan Belanda. Tanggal 19 Spetember 1987 Pemerintah RI mengesahkan UU No.7 Tahun 1987 sebagai perubahan atas UU No. 12 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Sementara pada tanggal 13 Oktober 1989 pemerintah bersama DPR mengesahkan UU No.6 Tahun 1989 tentang paten yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 1991. Pada perkembangan selanjutnya pemerintah mengesahkan UU No.19 tahun 1992 tentang untuk menggantikan UU Merek 1961. Lima tahun kemudian, pada tahun 1997 pemerintah RI merevisi perangkat peraturan perundang-undangan di bidang HKI, yaitu UU Hak Cipta 1987 jo. UU No. 6 Tahun 1982, UU Paten 1989 dan UU Merek 1992 ke dalam UU No. 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta. Tahun 2000, pemerintah mengesahkan tiga UU baru di bidang HKI, yaitu UU No.30 Tahun

¹ Achmad Zen Umar Purba, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Bandung: Alumni, hal 4

2000 tentang Rahasia Dagang, UU No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan UU No.32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Upaya pemerintah untuk menyelaraskan semua peraturan perundang-undangan di bidang HKI adalah dengan mengesahkan UU No.14 Tahun 2001 tentang Paten, UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek, dan UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Penyempurnaan dan penyelarasan ini diperlukan sehubungan perkembangan kehidupan yang berlangsung cepat, terutama di bidang perekonomian tingkat nasional dan internasional yang menuntut pemberian perlindungan yang lebih efektif terhadap Hak Cipta. Selain itu juga karena penerimaan dan keikutsertaan Indonesia di dalam Persetujuan *TRIP's* yang merupakan bagian dari *Agreement Establishing the World Trade Organization*.

Indonesia berusaha menegakkan prinsip-prinsip pokok yang dikandung dalam *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) tersebut termasuk di dalamnya mencakup *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIP's) yang intinya mengatur ketentuan-ketentuan di bidang Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Indonesia sebagai anggota WTO, terikat penuh pada aturan TRIP's maka aturan HKInya harus menyesuaikan dengan aturan TRIP's dan konvensi internasional HKI yang menjadi substansinya (*Full Compliance*), yang artinya negara-negara peserta wajib menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional mengenai HKI secara penuh terhadap perjanjian-perjanjian internasional tentang HKI.²

Selain itu Indonesia harus menjamin perlindungan HKI yang berasal dari negara lain sama seperti melindungi HKI yang berasal dari dalam negeri (*National*

² Muhamad Djumhana; R. Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual, Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal. 18

Treatment Principle). Indonesia juga harus melaksanakan kewajibannya menetapkan beberapa undang-undang di bidang HaKI lainnya yaitu Undang-Undang Desain Industri (*Industrial Designs*), Rahasia Dagang (*Protection of Undisclosed Information*), dan Semi Konduktor (*Lay-out Designs of Integrated Circuits*) serta Anti Persaingan Curang dalam Perjanjian Lisensi (*Control of Anty Competitive Practices in Contractual Licences*).³

Mengacu pada kewajiban Indonesia yang terikat dengan aturan TRIP's, saat ini terdapat 7 rejim pengaturan mengenai HKI di Indonesia, yakni:⁴

1. Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang kemudian diganti dengan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
2. Paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001
3. Merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001
4. Perlindungan Varietas Baru Tanaman diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000
5. Rahasia Dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000
6. Desain Industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000
7. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000.

Industri batik dalam memasarkan produknya baik ke pasar domestik maupun internasional, tentunya menggunakan merek dagang yang menjadi simbol dan *image* dari masing-masing perusahaan. Peran merek dalam hal ini sangat

³ Yayasan Klinik HAKI, 2006, *Kompilasi Undang-undang Hak Cipta, Paten Merek dan Terjemahan Konvensi-konvensi di Bidang Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 19

⁴ Achmad Zen Umar Purba, *Op.Cit.*, Hal 4.

penting karena merek menunjukkan identitas perusahaan asal batik, mutu (kualitas), dan juga sebagai *image* perusahaan yang memproduksi dan memasarkan batik tersebut.

Sangatlah penting untuk memberikan perlindungan atas motif-motif batik yang baru, desain-desain baju batik, termasuk juga merek dagang atas produk batik tersebut. Disamping memberikan perlindungan, hukum juga berperan dalam memberikan adanya kepastian hukum terhadap tindakan pelanggaran atas desain-desain motif batik maupun pemalsuan merek-merek dagang atas produk batik di pasaran melalui pemberian sanksi yang tegas, baik sanksi perdata maupun pidana.

Mengenai pelanggaran terhadap desain industri, diundangkannya UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dimaksudkan untuk memberikan hak dan kewajiban kepada pendesain. Disamping itu, pengaturan desain industri dengan undang-undang juga dimaksudkan untuk memberikan landasan perlindungan hukum yang efektif guna mencegah berbagai bentuk pelanggaran berupa penjiplakan, pembajakan atau peniruan atas suatu desain industri terkenal yang merupakan hak eksklusif bagi pendesain.

Melalui hak eksklusif tersebut, pendesain atau pemegang hak desain industri dapat mempertahankan haknya kepada siapapun juga yang berupaya menyalahgunakan dan pendesain mempunyai hak yang seluas-luasnya untuk menggunakan hak tersebut untuk kepentingan pribadi atau perusahaannya asal tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Salah satu fungsi diberikannya hak eksklusif tersebut adalah untuk membina dan menyegarkan sistem perdagangan bebas yang bersih serta persaingan jujur dan sehat, sehingga kepentingan

masyarakat luas dapat dilindungi dari perbuatan curang yang dilakukan oleh pihak yang beritikad buruk.

Suatu merek dan desain dari suatu produk perlu mendapat perlindungan ataupun pengaturan perlindungan hukum. Oleh karena itu perlindungan merek dan desain industri diberlakukan untuk memberikan landasan bagi perlindungan yang efektif terhadap segala bentuk penjiplakan, pembajakan, atau peniruan atas merek dan desain industri. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap merek dan desain industri dimaksudkan untuk mencegah pemalsuan, penjiplakan, serta merangsang aktifitas kreatif dari pendesain untuk terus menerus menciptakan desain baru.

Berdasarkan hal tersebut di atas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian tentang usaha-usaha apa saja yang bisa dilakukan untuk menghilangkan atau mengurangi praktek pelanggaran merek pada industri tekstil di masa mendatang. Maka dilakukan penelitian dengan judul: “Perlindungan Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Terhadap Produk Batik di Perusahaan Batik Brotseno Sragen.”

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Perusahaan Batik Brotseno Sragen untuk melindungi merek produk batiknya?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap desain-desain baju batik produksi Perusahaan Batik Brotseno Sragen?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Perusahaan Batik Brotoseno Sragen untuk melindungi merek produk batiknya
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap desain-desain baju batik produksi Perusahaan Batik Brotoseno Sragen

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum, terutama pada bidang Hak Kekayaan Intelektual atau lebih spesifik lagi pada bidang merek dan desain industri, sehingga dapat memberikan kontribusi akademis mengenai gambaran perlindungan HKI di Indonesia

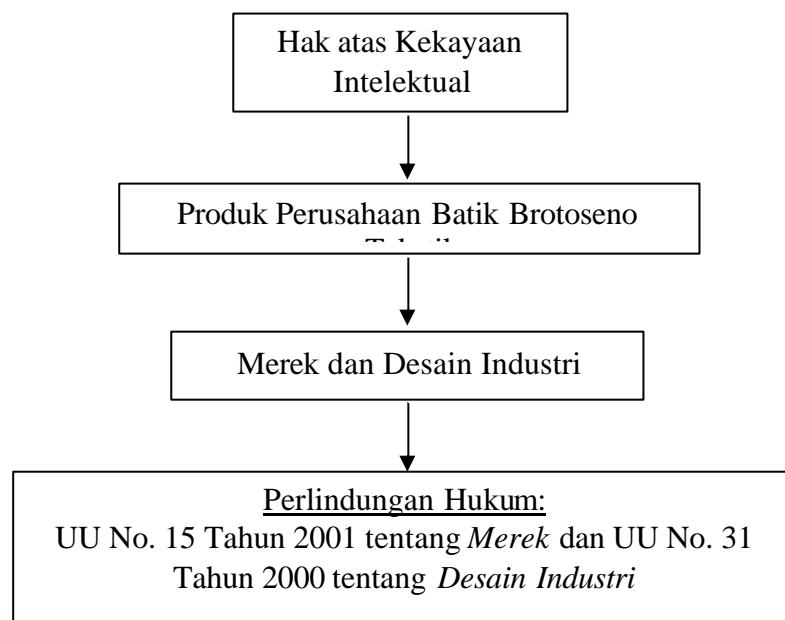
2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi para pihak yang berkaitan dengan perlindungan atas merek sebagai langkah antisipatif berkaitan dengan kemungkinan adanya pembajakan dan pemalsuan terhadap merek dan desain industri.

E. Kerangka Pemikiran

Untuk memberikan perlindungan terhadap hak yang dimiliki oleh seseorang, tentunya hukum berperan sebagai sarana pembaharuan masyarakat untuk mewujudkan ketertiban, keadilan, kepastian dan kemakmuran yang pada

akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tujuan hukum adalah ketertiban dan mencapai keadilan. Guna mencapainya diperlukan adanya kepastian dalam suatu masyarakat yang teratur. Perlindungan hukum HKI khususnya di Perusahaan Batik Brotseno Sragen dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Penjelasan kerangka pemikiran:

Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual manusia secara ekonomis. Oleh karena itu, objek yang diatur dalam Hak Kekayaan Intelektual adalah karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. HKI adalah hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. HKI dikategorikan sebagai hak atas

kekayaan mengingat HKI pada akhirnya menghasilkan karya-karya intelektual berupa: pengetahuan, seni, sastra dan teknologi, di mana dalam mewujudkannya membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu, biaya, dan pikiran. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya intelektual menjadi memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan (*property*) terhadap karya-karya intelektual tadi.⁵

Hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda immaterial. Benda tidak berwujud. Pengelompokan Hak atas Kekayaan Intelektual lebih lanjut dapat dikategorikan dalam kelompok sebagai berikut: 1) Hak Cipta (*Copy Rights*) 2) Hak Milik (hak kekayaan) Perindustrian (*Industrial Property Rights*).⁶

Hak atas kekayaan perindustrian dapat diklasifikasikan lagi menjadi:

1. *Patent* (Paten)
2. *Utility Models* (Model dan Rancang Bangun) atau dalam hukum Indonesia, dikenal dengan istilah paten sederhana (*simple patent*).
3. *Industrial Design* (Desain Industri)
4. *Trade Mark* (Merek Dagang)
5. *Trade Names* (Nama Niaga atau Nama Dagang)
6. *Indication of Source or Appellation of Origin* (sumber asal)⁷

⁵ Sudaryat, Sudjana, dan Rika Ratna Permata, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung, Oase Media, Hal. 15.

⁶ Ibid. Hal. 18

⁷ Sudaryat, Sudjana, dan Rika Ratna Permata, *Op.Cit*, Hal. 24

Merek mempunyai peran yang sangat penting, karena merek dapat berfungsi sebagai tanda pengenal untuk membedakan produk perusahaan yang satu dengan produk perusahaan yang lain yang sejenis serta menghubungkan produk dengan produsen/pedagangnya sebagai jaminan reputasi hasil usahanya ketika diperdagangkan. Merek juga berfungsi sebagai sarana promosi dagang, dimana merek merupakan simbol pengusaha untuk memperluas pasar produk dagangnya serta untuk menarik minat konsumen untuk membeli, sebagai jaminan atas mutu produk karena melalui merek konsumen dapat mengetahui akan mutu produk yang dibelinya, dan juga sebagai asal produk dimana merek merupakan tanda pengenal asal produk yang menghubungkan produk dengan produsen atau dengan daerah/Negara asalnya.⁸

Pasal 1 butir 1 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek memberikan definisi merek sebagai suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Sedangkan Pasal 1 butir 2 nya mengartikan merek dagang sebagai suatu merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenisnya.

Mengenai desain industri, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang menyebutkan bahwa:

⁸ Abdulkadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, hal. 120.

Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis dan warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Pendesain diberikan hak atas desain industri sebagaimana diatur dalam

Pasal 1 angka 5 UU Desain Industri menyatakan:

Hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Hak desain industri yang dimaksud adalah hak eksklusif pendesain terdaftar yang diperoleh dari negara. Dengan kata lain, berarti diperolehnya hak kekayaan atas desain industri sebagai konsekuensi telah terdaftarnya desain tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris atau yuridis sosiologis, yaitu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan meneliti data primer yang ada di lapangan.⁹

Penggunaan metode yuridis-sosiologis sejalan dengan pendapat bahwa hubungan antara teori hukum dan teori sosiologi dapat menjadi bahan penelitian untuk berbagai tujuan yang berbeda-beda.¹⁰ Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai macam perundang-undangan di bidang HKI yaitu perlindungan merek dan desain industri. Pendekatan sosiologis digunakan karena penelitian ini bertujuan memperoleh pengetahuan tentang aspek sosiologis

⁹ Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, Hal. 8

¹⁰ Bambang Sugono, 2004, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Hal. 73

masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap produk di Perusahaan Batik Brotseno Sragen.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Adapun pengertian dari metode penelitian deskriptif adalah memberikan data seteliti mungkin tentang manusia atau gejala lainnya. Sedangkan apabila dikaitkan dengan tujuan-tujuannya, maka penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk menemukan fakta belaka (*facta finding*). Sedangkan pengertian dari penelitian analitis adalah mengumpulkan data yang diperoleh kemudian dianalisa untuk menggambarkan suatu gejala tertentu atau menjelaskan postulat-postulat yang diteliti secara lengkap sesuai temuan di lapangan untuk memecahkan masalah yang timbul.¹¹

3. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari informasi yang didapat dari hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait, yang mana hasil wawancara ini dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Sumber data primer diperoleh dari: manajemen Perusahaan Batik Brotseno Sragen, staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen, staf Kantor Pelayanan Hukum Umum Kanwil Departemen Hukum dan HAM Kabupaten Sragen.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, Hal. 10

b. Data Sekunder

Penelitian ini menggunakan data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, misalnya:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
 - c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan-bahan hukum primer, seperti misalnya karya ilmiah dan tulisan para ahli.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data primer, yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara secara bebas terpimpin, dengan berbagai pihak yang dipandang memahami objek yang diteliti.

b. Studi Kepustakaan

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara, mencari, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin-doktrin, dan data-data sekunder yang lain, yang terkait dengan objek yang dikaji. Adapun instrumen pengumpulan yang digunakan berupa form dokumentasi, yaitu suatu alat pengumpulan data sekunder, yang berbentuk

format-format khusus, yang dibuat untuk menampung segala macam data, yang diperoleh selama kajian dilakukan.

5. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif empiris, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang dibahas. Tujuan digunakannya analisis kualitatif empiris ini adalah untuk mendapatkan pandangan-pandangan mengenai perlindungan merek dan desain industri atas produk di Perusahaan Batik Brotseno Sragen.

Analisis data kualitatif empiris adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis/lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti, dan dipelajari secara utuh. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan dan disusun secara sistematis yang merupakan jawaban atas permasalahan.¹²

G. Sistematika Penulisan

Dalam rangka mempermudah para pembaca dalam memahami isi skripsi ini, maka perlu dikemukakan sistematika skripsi sebagai berikut :

BAB I adalah Pendahuluan yang berisikan gambarann singkat mengenai isi skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Pembatasan Masalah, Perumusan

¹² Soerjono Soekanto, *Op Cit*, Hal. 250

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematikan Penulisan.

BAB II adalah Tinjauan pustaka, dalam bab ini penulis akan menuliskan beberapa yang menjadi acuan dalam penulisan mengenai: Tinjauan tentang Hak Kekayaan Intelektual: pengertian, jenis-jenis hak intelektual, hak intelektual di bidang industri; Tinjauan umum tentang Merek: Pengertian Merek, Pendaftaran Merek, Jangka waktu perlindungan merek; Tinjauan umum tentang Desain Industri: Pengertian Desain Industri, Ruang lingkup perlindungan Desain Industri, subjek desain industri, jangka waktu perlindungan desain Industri; Tinjauan umum tentang Batik.

BAB III adalah hasil Penelitian dan Pembahasan dimana penulis akan menguraikan dan membahas mengenai: (1) upaya yang dilakukan oleh Perusahaan Batik Brotoseno Sragen untuk melindungi merek produk batiknya; (2) perlindungan hukum terhadap desain-desain baju batik produksi Perusahaan Batik Brotoseno Sragen.

BAB IV adalah penutup, yang berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.